

ISSN 1693-2226



PAKAR

PENDIDIKAN

Penelitian Aktual dan Kajian Analisis Reformasi Pendidikan

.....◇ Volume 9, Nomor 2, Juli 2011 ◇.....

Diterbitkan oleh
Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa
(The Center of Research and Scientific Development for Student)
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

PAKAR PENDIDIKAN	Vol.9	No.2	Hal. 101 - 201	Padang Juli 2011	ISSN 1693-2226
----------------------------	-------	------	-------------------	---------------------	-------------------



PAKKAR

PENDIDIKAN

Volume 9, Nomor 2 Juli 2011

PAKKAR Pendidikan (Penelitian Aktual dan Kajian Analisis Reformasi Pendidikan) adalah Jurnal Ilmiah Kependidikan Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang (PPIPM UNP) berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian terbaru dan kajian analisis kritis di bidang pendidikan.

Terbit 2 kali setahun pada bulan Januari dan Juli.

PELINDUNG

Z. Mawardi Effendi

(Rektor UNP)

Alizamar

(Pembantu Rektor III UNP)

PENANGGUNG JAWAB/PENASEHAT

Suparno

Imam Mahir

Wawan Purwanto

KETUA DEWAN PENYUNTING

Mabrur M. Yusup

WAKIL KETUA DEWAN PENYUNTING

Fitra Vertikal

PENYUNTING AHLI

Suparno (UNP)

Abizar (UNP)

M. Zaim (UNP)

Imam Sodikoen (UNP)

Lisna Lubis (UNJ)

Suminto A. Sayuti (UNY)

Ahmad Fauzan (UNP)

SEKRETARIAT

Dian Fransis Pratiwi

Ridwan

Lafziah Hilmi

Doni Purnawi H

Ikhsan Nasution

ALAMAT PENYUNTING

DAN TATA USAHA

Sekretariat PPIPM Gedung PKM UNP G-49 Kampus Pusat Air Tawar Barat.

Jl. Prof. Dr. Hamka Padang.

Sumatera Barat. 25131.

Telp. (0751) 7055628

Fax. (0751) 7055628

DITERBITKAN OLEH

Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa

(*The Center of Research and Scientific Development for Student*)

Universitas Negeri Padang

(PPIPM UNP)

Dewan penyunting menerima artikel yang belum pernah diterbitkan dalam media lain, untuk selanjutnya dievaluasi dan disunting. Dengan ini dewan penyunting juga mengundang semua elemen masyarakat untuk menyumbangkan artikelnnya dalam rangka menunjang pengembangan studi di bidang pendidikan di tanah air.

PENGANTAR REDAKSI

Syukur alhamdulillah, jurnal PAKAR Pendidikan Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa (PPIPM) telah terbit kembali pada volume kesembilan nomor dua Juli 2011. Pada volume Sembilan nomor dua ini jurnal PAKAR Pendidikan mengusung tujuh artikel dari berbagai kalangan masyarakat ilmiah bidang pendidikan. Tujuannya adalah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi seluruh elemen masyarakat ilmiah untuk terus eksis berkarya dalam karya tulis ilmiah. Hal ini merupakan bagian dari visi PPIPM dalam rangka menjaga eksistensi dan konsisten dalam publikasi ilmiahnya. Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pendidikan (Mahasiswa, Guru, Dosen) terhadap publikasi ilmiah dari hasil penelitian maupun kajian analisis dalam bidang pendidikan. Komitmen ini akan terus kami jaga dan kami kembangkan dengan terus melakukan perbaikan diri dan melakukan seleksi terhadap karya terbaik yang akan kami terbitkan dimasa mendatang.

Dewan redaksi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh penulis artikel, semoga karya terbaik ini dapat menjadi bahan yang menarik dan bermanfaat bagi sidang pembaca sekalian.

Redaksi

DAFTAR ISI

- PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) UNTUK PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR MEMBACA PEMAHAMAN SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 PERANAP
(Erlonnofis) (101 – 116)
- PENGUNAAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF DENGAN PAIKEM UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPA SISWA KELAS V SD N 019 KECAMATAN PRANAP KABUPATEN-INDRAGIRI HULU
(Nurlasmi) (117 – 136)
- PENGARUH KUALITAS LAYANAN AKADEMIK DAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERISTAS NEGERI PADANG
(Perengki Susanto) (137 – 146)
- PERENCANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 12 TAHUN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
(Toto Sugiarto dan Hasan Maksum) (147 – 164)
- MERANCANG PROSES PEMBELAJARAN MENUJU KEMANDIRIAN BELAJAR MATA KULIAH MOTOR DIESEL MAHASISWA TEKNIK OTOMOTIF FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG
(Wawan Purwanto & Donny Fernandez) (165 – 174)
- PEMEROLEHAN BAHASA ANAK (KAJIAN *MEAN LENGTH OF UTTERANCE* (MLU) PADA ANAK USIA TIGA TAHUN DELAPAN BULAN)
(Witri Annisa) (175 – 182)
- PENGARUH PEMBELAJARAN MODUL DAN MOTIVASI TERHADAP HASIL BELAJAR GEOGRAFI SISWA KELAS X DI SMA N 1 PERANAP KECAMATAN PERANAP
(Yuliatin) (183 – 201)

PERENCANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN 12 TAHUN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Toto Sugiarto dan Hasan Maksum
Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

Abstract:

Target of compulsory education 12 year is to improve the quality of Human Resource in West Sumatra. Potency to execute of compulsory education 12 year is very high, this matter as according to planning of development of education in RPJP 2005-2025 of province West Sumatra, and supported to through fund allocation for to education sector until 20% from APBD. The research for description of education condition in level SMA/MA/SMK, planning requirement of education component and calculate execution time is needed for compulsory education 12 year, compiling strategy and policy, and also analyse of education budget to execute is obliged to compulsory of education 12 year. Research use data sekunder from Statistics of Sumatera Barat Province (BPS), Statistical Finance of Area, and education profile of Sumatera Barat Province. The analysis method that is analysis calculation of education indicator, analyse planning education, analyse SWOT, and Analysis Budget Education. Result of calculation of Number Participation Performance (APK) in education of SMA/MA/SMK, this is represent indicator is not complete of execution in education of SMA/MA/SMK. For execute is compulsory education 12 Year, hence needed planning of requirement of teacher, class room, and school, which the adapted for the amount of student. Pursuant to result of performance prediction of APK SMA/MA/SMK until year 2015 about 96,31 %. Analysis of SWOT formulated of strategy to overcome influence of factor of eksternal and is internal. Seen from aspect requirement of budget conclude government of province West Sumatra ready and can to execute to compulsory education 12 year.

Kata Kunci: pelaksanaan, wajib belajar, pendidikan 12 tahun

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan bangsa, sejarah menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pembangunan negara-negara maju adalah tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dalam jumlah, jenis, dan tingkat yang memadai. Oleh karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka. Sumber daya manusia yang bermutu, yang merupakan produk

pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara. (Depdiknas, 2008a).

Menyadari hal tersebut di atas pada tahun 1984 telah dicanangkan program wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun, yang kemudian pada tahun 1994 dilanjutkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan semua warga negara Indonesia memiliki pendidikan minimal

setara Sekolah Menengah Pertama dengan mutu yang baik. Dengan bekal ini diharapkan seluruh warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Depdiknas, 2008a).

Tantangan paling serius yang dihadapi bangsa ini dimasa depan adalah fenomena globalisasi yang tidak mungkin dihindari, sehingga harus dihadapi dengan segala konsekuensinya. Fenomena global adalah efek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Diberlakukannya AFTA 2003 (*Asean Free Trade Area*), APEC 2010 (*Asia Pacific Economic Cooperation*) dan WTO 2020 (*World Trade of Organization*), harus diantisipasi dan disiasati sejak dini agar kita menjadi bangsa yang kompetitif. Oleh karena itu, semua upaya bangsa, termasuk bidang pendidikan sudah saatnya diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa (*nation's competitiveness*). (Uno, 2007).

Secara politis tekad pemerintah untuk membangun pelayanan pendidikan bagi seluruh rakyat terlihat cukup besar. Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

(Ayat 1) dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya (Ayat 2). Skema pembiayaan pendidikan oleh pemerintah tersebut diatur pada (ayat 4) yang berbunyi: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional".

Kondisi umum sektor pendidikan di Indonesia ditandai oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), sekitar 58 % dari tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau kurang, pada saat yang sama, hanya 4% dari tenaga kerja yang berpendidikan tinggi. Prospek peningkatan kualitas SDM di masa yang akan datang pun terlihat suram. Rata-rata angka partisipasi pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi masih relatif rendah, 56% untuk SLTP, 32% untuk SLTA dan 12% untuk perguruan tinggi. (Priyono, 2007).

Depdiknas (2008b), menjelaskan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai salah satu indikator ketuntasan wajib belajar 9 tahun dapat dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu: (a) Tuntas pratama, bila APK mencapai 80% sampai dengan 84%; (b) Tuntas madya, bila APK mencapai 85% sampai dengan 89%; (c) Tuntas utama, bila APK mencapai 90% sampai 94%; dan (d)

Tuntas paripurna, bila APK mencapai minimal 95%.

Berdasarkan data pada lampiran 1, dapat dikemukakan bahwa capaian APK SMP/MTs tahun 2009/2010 provinsi Sumatera Barat dengan capaian APK SMP/MTs sebesar 108,92%, telah mencapai ketuntasan program wajib belajar 9 tahun pada tahap tuntas paripurna. Sedangkan apabila dilihat secara keseluruhan, dari 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, hanya 3 kabupaten yang belum tuntas melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, dimana nilai APK SMP/MTs dibawah 95%, yaitu: Kabupaten Kepulauan Mentawai (83,27%), Kabupaten Pasaman (89,43%), dan Kabupaten Sijunjung (90,89%). Kabupaten Kepulauan Mentawai (83,27%). Sedangkan 16 kabupaten/kota lainnya telah mencapai ketuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Departemen Pendidikan Nasional menghimbau bagi pemerintah daerah yang telah menuntaskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, agar melanjutkan dengan Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bangka Belitung (Kota Pangkalpinang), Jawa Barat (Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Bekasi), Bali (Kabupaten Jembrana), dan Kalimantan Timur (Kabupaten Kutai Timur) yang telah berhasil menuntaskan program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun pada tahun 2007, dan tahun 2008 telah memulai melaksanakan program wajib belajar pendidikan 12 tahun. (Mu'arif, 2008; Depdiknas, 2008a).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 (Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor: 7 Tahun 2008), menyusun agenda pembangunan dalam bidang pendidikan yang diharapkan target universal untuk pencapaian lama sekolah penduduk adalah selama 12 tahun, dan target demikian diharapkan dapat dicapai tahun 2015. Dengan mengacu pada kondisi-kondisi tersebut di atas serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 Provinsi Sumatera Barat, penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis dan merencanakan serta menyusun strategi untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan 12 tahun di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian di atas yaitu: 1) Mendeskripsikan kondisi pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Provinsi Sumatera Barat. 2) Merencanakan kebutuhan komponen pendidikan dan menghitung lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun di Provinsi Sumatera Barat. 3) Menyusun strategi dan kebijakan yang

digunakan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun. 4) Menganalisis kebutuhan anggaran pendidikan pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan kepada permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian, maka penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk mengungkapkan sesuatu apa adanya.

Tempat penelitian adalah provinsi Sumatera Barat, dipilihnya provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian dengan alasan karena peneliti ingin mengetahui kesiapan pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan 12 tahun.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data-data yang dikeluarkan oleh instansi terkait dengan

sumber data dari: Badan Pusat Statistik (BPS), Sumatera Barat dalam Angka, Statistik Keuangan Daerah, data profil pendidikan dinas pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dan data Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas.

Untuk dapat menjawab tujuan penelitian digunakan beberapa metode analisis, yaitu: 1) Analisis perhitungan indikator pendidikan digunakan untuk menghitung capaian indikator keberhasilan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, yang meliputi: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melanjutkan (AM), Rasio Siswa per Sekolah (R-S/S), Rasio Siswa Per Kelas (R-S/K), Rasio Siswa per Guru (R-S/G), Rasio Kelas per Guru (R-K/G), dan Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK). 2) Analisis perencanaan digunakan untuk merencanakan kebutuhan guru, jumlah kelas, jumlah sekolah, dan menghitung lamanya

Tabel 1. Standard Ideal Indikator Pemerataan dan Perluasan Pendidikan

No	Jenis Indikator	Standar Ideal		
		Tk. SD	Tk. SMP	Tk. SMA/MA/SMK
1.	Angka partisipasi kasar (%)	Sekitar 100	Sekitar 100	Sekitar 100
2.	Angka partisipasi murni (%)	Mendekati 100	Mendekati 100	Mendekati 100
3.	Angka melanjutkan (%)	-	100	100
4.	Rasio siswa/sekolah	240	360	360
5.	Rasio siswa/kelas	40	40	40
6.	Rasio siswa/guru	40	21	21
7.	Rasio kelas/guru	1	0,42	0,42
8.	Rasio kelas/ruang kelas	1	1	1

Sumber: Biro Perencanaan, Depdiknas (2010)

waktu (tahun) yang dibutuhkan untuk menuntaskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun di provinsi Sumatera Barat. 3) Analisis SWOT digunakan untuk menentukan kebijakan strategis dalam rangka pengambilan keputusan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun di provinsi Sumatera Barat. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis baik faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang dan tantangan). 4) Analisis Anggaran Pendidikan digunakan untuk mengetahui ketersediaan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun. Caranya dengan menghitung kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program wajib belajar pendidikan 12 tahun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Capaian indikator pemerataan dan perluasan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK meliputi: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Melanjutkan (AM), Rasio Siswa per Sekolah (R-S/S), Rasio Siswa per Kelas (R-S/K), Rasio Siswa per Guru (R-S/G), Rasio Kelas per Guru (R-K/G), dan Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK), dihitung dengan menggunakan data pendidikan yang disajikan pada tabel 2.

Berdasarkan data tabel 2 di atas selanjutnya dilakukan analisis perhitungan indikator pemerataan dan perluasan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Provinsi Sumatera Barat tahun 2009/2010, kemudian hasil perhitungan indikator pemerataan dan perluasan

Tabel. 2: Data indikator pemerataan dan perluasan pendidikan jenjang pendidikan SMA/MA/SMK Sumatera Barat tahun 2009/2010

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Murid SMA/MA/SMK	Orang	237.936
2	Jumlah Penduduk Usia 16 – 18 tahun	Orang	284.863
3	Jumlah Murid SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun	Orang	193.759
4	Jumlah Mahasiswa tk I pada Perguruan Tinggi	Orang	29.789
5	Jumlah Lulusan SMA/MA/SMK sebelumnya	Orang	53.045
6	Jumlah Sekolah SMA/MA/SMK	Sekolah	656
7	Jumlah Guru SMA/MA/SMK	Orang	18.767
8	Jumlah Kelas SMA/MA/SMK	Rombel	5.611
9	Jumlah Ruang Kelas SMA/MA/SMK	Ruang	5.445

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera barat. 2010

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Provinsi Sumatera barat. 2010

Indonesia Education Statistic, Ministry of National Education. 2010

Sumatera Barat dalam Angka, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera barat. 2010

Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas 2011

pendidikan ini dibandingkan dengan standar ideal yang dijadikan indikator keberhasilan pendidikan, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

diproyeksikan menggunakan metode kuadrat terkecil (*Least Squares Method*) serta diasumsikan adanya pertumbuhan yang positif. Hasil hitungan proyeksi untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 3. Indikator pemerataan dan perluasan pendidikan jenjang SMA/MA/SMK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009/2010

No	Indikator	Satuan	2009/2010	Standar Ideal
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	83,53	Sekitar 100
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	68,02	Mendekati 100
3	Angka Melanjutkan (AM)	%	56,16	100
4	Rasio Siswa per Sekolah (R-S/S)		363	360
5	Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)		42	40
6	Rasio Siswa per Guru (R-S/G)		13	21
7	Rasio Kelas per Guru (R-K/G)		0.30	0,42
8	Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)		1.03	1

Sumber : Hasil hitungan penulis, data pusat statistik pendidikan Kemendiknas (2011).

Analisis kebutuhan komponen pendidikan diawali dengan memproyeksi jumlah penduduk usia 16-18 tahun, jumlah murid SMA/MA/SMK, dan jumlah murid SMK/MA/SMK usia 16-18 tahun, mulai tahun 2011 sampai dengan 2015, dengan

Untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun di provinsi Sumatera Barat, maka dibutuhkan jumlah guru yang sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah siswa

Tabel 4. Proyeksi jumlah penduduk usia 16-18 thn dan jumlah murid SMA/MA/SMK Sumatera Barat tahun 2011 – 2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun	Orang	286.432	289.932	293.432	296.432	300.435
2	Jumlah Murid SMA/MA /SMK	Orang	241.854	247.726	261.598	275.469	289.341
3	Jumlah Murid SMA/MA /SMK Usia 16-18 tahun	Orang	198.364	205.664	218.963	232.263	245.562

Sumber: Hasil proyeksi penulis

SMA/MA/SMK tahun 2011-2015 tabel 4.3 di atas, dan dengan prediksi capaian APK SMA/MA/SMK diasumsikan meningkat sampai 96,31% pada tahun 2015 sebagai indikator ketuntasan wajib belajar pendidikan 12 tahun, maka dilakukan perhitungan kebutuhan jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tahun 2011-2015, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

guru dari daerah yang kelebihan guru ke daerah-daerah yang kekurangan guru.

Kebutuhan ruang kelas untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun di provinsi Sumatera Barat, dihitung sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah siswa SMA/MA/SMK tahun 2011-2015, dan dengan prediksi capaian APK

Tabel 5. Perhitungan kebutuhan guru SMA/MA/SMK

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Prediksi* Capaian APK	Jumlah Murid SMA/MA/SMK	Kebutuhan	Standar ideal
		Usia 16-18 tahun	SMA/MA/SMK		Guru	R-S/G
1	2011	286.432	84,44 %	241.854	11,517	1 : 21
2	2012	289.932	85,44 %	247.726	11,796	
3	2013	293.432	89,15 %	261.598	12,457	
4	2014	296.432	92,77 %	275.469	13,118	
5	2015	300.435	96,31 %	289.341	13,778	

Sumber : Hasil perhitungan penulis

Berdasarkan hasil perungan tabel 5 di atas dapat diketahui jumlah guru SMA/MA/SMK yang dibutuhkan provinsi Sumatera Barat pada tahun 2011 sebanyak 11.517 orang, dan tahun 2015 dibutuhkan guru sebanyak 13.778 orang. Dengan mengacu pada kondisi jumlah guru SMA/MA/SMK yang ada saat ini, dimana jumlah guru SMA/MA/SMK yang ada saat ini sebanyak 18.767 orang, maka perlu dilakukan kebijakan untuk pendistribusian

SMA/MA/SMK diasumsikan meningkat sampai 96,31 % pada tahun 2015 sebagai indikator ketuntasan wajib belajar pendidikan 12 tahun, maka dilakukan perhitungan kebutuhan ruang kelas pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tahun 2011-2015, yang lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 6 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah ruang kelas yang dibutuhkan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12

Tabel 6. Perhitungan kebutuhan ruang kelas SMA/MA/SMK

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Prediksi* Capaian APK	Jumlah Siswa	Kebutuhan Ruang kelas	Standar ideal
		usia 16-18 tahun	SMA/MA/SMK		R-S/K	
1	2011	286.432	84,44 %	241.854	6,046	1:40
2	2012	289.932	85,44 %	247.726	6,193	
3	2013	293.432	89,15 %	261.598	6,540	
4	2014	296.432	92,77 %	275.469	6,887	
5	2015	300.435	96,31 %	289.341	7,234	

Sumber : Hasil perhitungan penulis

tahun pada tahun 2011 sebanyak 6.046 ruang kelas, dan tahun 2015 sebanyak 7.234 ruang kelas. Dengan melihat kondisi yang ada sekarang dimana jumlah ruang kelas yang ada sebanyak 5.445 ruang kelas, maka perlu dilakukan penambahan ruang kelas baru secara bertahap agar bisa memenuhi kebutuhan ruang kelas.

Jumlah sekolah yang dibutuhkan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun, dihitung sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah siswa SMA/MA/SMK tahun 2011-2015, dan dengan prediksi capaian APK SMA/MA/SMK diasumsikan meningkat

sampai 96,31 % pada tahun 2015 sebagai indikator ketuntasan wajib belajar pendidikan 12 tahun, maka dilakukan perhitungan kebutuhan sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tahun 2011-2015, yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.

Berdasarkan hasil hitungan tabel 7 di atas, dapat diketahui kebutuhan sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun pada tahun 2011 sebanyak 672 sekolah (sekolah tipe C terdiri dari 9 kelas dengan 360 siswa), dan tahun 2015 dibutuhkan sebanyak 804 sekolah. Jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang

Tabel 7. Perhitungan kebutuhan sekolah SMA/MA/SMK

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Prediksi* Capaian APK	Jumlah Siswa	Kebutuhan	Standar ideal
		usia 16-18 tahun	SMA/MA/SMK		Sekolah	R-S/S
1	2011	286.432	84,44 %	241.854	672	1:360
2	2012	289.932	85,44 %	247.726	688	
3	2013	293.432	89,15 %	261.598	727	
4	2014	296.432	92,77 %	275.469	765	
5	2015	300.435	96,31 %	289.341	804	

Sumber : Hasil perhitungan penulis

ada pada tahun 2010 sebanyak 656 sekolah, maka diperlukan pembangunan unit sekolah baru (USB) untuk memenuhi kebutuhan sekolah tersebut di atas. Namun demikian dalam penambahan unit sekolah baru harus mengacu pada kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, yang akan menjadikan rasio SMA:SMK menjadi 30:70, sehingga penambahan sekolah-sekolah baru harus lebih banyak SMK dibandingkan SMA.

Untuk menghitung lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun di provinsi Sumatera Barat, dilakukan dengan menghitung besarnya pencapaian APK jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, dimana pendidikan 12 tahun bagi semua penduduk dapat dicapai pada tahun 2015. Namun demikian target tersebut dapat dicapai apabila didukung dengan kebijakan dan program inovatif dari pemerintah provinsi Sumatera Barat, salah satunya dengan melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun.

Analisis strategi dan kebijakan pendidikan dilakukan dengan analisis SWOT, adapun tahap-tahap untuk melakukan analisis SWOT diawali dengan mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, kemudian masing-masing faktor tersebut dimasukkan ke dalam tabel IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) dan tabel EFAS

Tabel 8. Prediksi capaian APK dan APM SMA/MA/SMK di provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2015

***) Dasar prediksi capaian APK dan APM data proyeksi tabel 4.3**

No	Aspek yang diprediksi	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	84.44	85.44	89.15	92.77	96.31
2	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	69.25	70.94	74.62	78.22	81.74

Sumber : Hasil perhitungan penulis

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat pencapaian APK SMA/MA/SMK sampai tahun 2015 sekitar 96,31 %, indikator tingkat capaian APK 95% ke atas (tuntas paripurna). Hal ini sesuai target dari Rencana

(*Eksternal Strategic Factors Analysis Summary*) dan selanjutnya dimasukkan ke dalam matrik SWOT untuk dianalisis, sehingga menghasilkan strategi untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12

Tabel 9. Tabel IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun

FAKTOR-FAKTOR	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	KOMENTAR
STRATEGI INTERNAL				
KEKUATAN :				
1. Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang berkualitas untuk mengembangkan Dunia pendidikan	0.15	4	0.60	Kunci sukses pelaksanaan Program wajib belajar 12 Tahun
2. Dukungan pemerintah daerah yang Cukup besar pada sektor pendidikan dengan mengalokasi-kan 20% APBD Untuk sector pendidikan.	0.15	4	0.60	Dukungan dana yang cukup untuk melaksanakan Program wajib belajar 12
3. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA/SMK dan Paket C yang Terus meningkat.	0.10	4	0.40	Tingginya partisipasi masyarakat pada jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK
4. Tingginya jumlah siswa tamatan SMP/MTs sederajat yang melanjutkan ke Pendidikan SMA/MA/SMK.	0.10	3	0.30	Besarnya minat lulusan SMP/MTs untuk melanjutkan ke SMA/MA/SMK
5. Tersedianya jumlah SMA/ MA/SMK yang Memadai untuk menampung lulusan SMP/MTs.	0.10	3	0.30	Adanya jumlah sekolah untuk menampung siswa yang akan melanjutkan Pendidikan SMA/MA/SMK
KELEMAHAN :				
1. Tingkat pendidikan penduduk relatif masih rendah.	0.10	2	0.20	Rendahnya pendidikan
2. Banyaknya penduduk miskin yang ada di Sumatera Barat.	0.10	2	0.20	Banyaknya penduduk miskin
3. Belum tersedianya fasilitas pelayanan Pendidikan secara merata dan memadai.	0.10	2	0.20	Sarana pendidikan belum Memadai
4. Banyaknya Guru SMA/MA/SMK yang Belum Sarjana (S1)	0.10	2	0.20	Kompetensi guru yang masih Rendah
TOTAL	1.00		3.00	

Sumber : Hasil perhitungan penulis

tahun, kemudian strategi ini dijabarkan menjadi program dan kegiatan.

Pemberian skor bobot dan rating tabel IFAS di atas mengacu pada berapa besarnya pengaruh dan dampak faktor-faktor kekuatan dan kelemahan terhadap penentuan strategi yang akan digunakan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12

tahun, serta berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis tabel IFAS dan EFAS di atas, bahwa pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun dapat dilaksanakan di Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya

Tabel. 10. Tabel EFAS (*Eksternal Strategic Factors Analysis Summary*) pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun

FAKTOR-FAKTOR	BOBOT	RATING	BOBOT X RATING	KOMENTAR
STRATEGI EKSTERNAL				
PELUANG :				
1. Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan.	0.20	4	0.80	Daerah bisa merencanakan program inovatif pendidikan
2. Adanya Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	0.20	4	0.80	Adanya keuangan daerah yang mendukung program wajib belajar 12 tahun
3. Terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai akibat meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.	0.10	3	0.30	Adanya peran pendidikan terhadap pertumbuhan Ekonomi
4. Terjadinya pergeseran struktur masyarakat dari masyarakat tradisional Ke sektor jasa dan industri.	0.10	3	0.30	Tingginya minat masyarakat pada sektor industri dan jasa
ANCAMAN :				
1. Ada beberapa daerah yang sulit untuk dikembangkan sektor pendidikannya.	0.10	2	0.20	Perlu diperhatikan dalam perencanaan pendidikan
2. Dengan adanya otonomi daerah memungkinkan terjadinya perbedaaan Mutu pendidikan antar masing-masing kabupaten/kota.	0.10	2	0.20	Harus dipertimbangkan dalam menerapkan program pendidikan pada tiap daerah-daerah yang berbeda
3. Belum adanya legalisasi peraturan daerah tentang wajib belajar 12 tahun.	0.10	1	0.10	Perlu secepatnya dirumuskan perda wajib belajar 12 tahun
4. Pembiayaan sektor pendidikan yang Semakin lama semakin tinggi, sehingga Masyarakat dan pemerintah harus Semakin besar mengalokasikan dananya untuk sektor pendidikan.	0.10	1	0.10	Tantangan dalam Pembangunan pendidikan
TOTAL	1.00		2.80	

Sumber : Hasil perhitungan penulis

manusia. Rumusan strategi untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun di Provinsi Sumatera Barat, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 11.

Berdasarkan hasil analisis matrik SWOT tabel 11 di atas, dapat dirumuskan

empat rumusan strategi yang digunakan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun di Sumatera Barat, yaitu: 1) Membangun unit sekolah baru (USB) sesuai tuntutan masyarakat dan kebutuhan pasar kerja/industri. ($S_{1,2,3,4}$; $O_{1,2,3}$). Strategi ini

Tabel 11. Matrik SWOT Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTH (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk mengembangkan dunia pendidikan. Dukungan Pemerintah daerah yang besar pada sektor pendidikan, yaitu dengan mengalokasikan 20% dari APBD untuk sektor pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA/SMK dari tahun ke tahun selalu meningkat. Tingginya jumlah siswa tamatan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/MA/SMK yang mencapai 99,81%. Telah tersedianya jumlah SMA/SMK/MA yang memadai untuk menampung lulusan SMP/MTs. 	<p style="text-align: center;">WEAKNESSES (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> Tingkat pendidikan penduduk di Sumatera Barat relatif masih rendah, dengan rata-rata lama sekolah sekitar 8,50 tahun. Banyaknya penduduk miskin yang ada di Sumatera Barat, berdasarkan hasil survey BPS pada Tahun 2010, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebesar 12,07%. Belum tersedianya fasilitas pelayanan pendidikan secara merata dan memadai. Banyaknya guru SMA/MA/SMK yang belum memenuhi standar ideal (jenjang pendidikan di bawah S1).
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Adanya undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Money follows function) Terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai akibat dari meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia. Terjadinya pergeseran masyarakat dari struktur tradisional/pertanian ke sektor jasa dan industri, akan mempengaruhi struktur ketenaga-kerjaan dan kesempatan kerja. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI SO</p> <p>Membangun unit sekolah baru (USB) sesuai tuntutan masyarakat dan kebutuhan pasar kerja/industri. (S_{1,2,3,4}; O_{1,2,3}).</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI WO</p> <p>Memberikan dana Bantuan Khusus Siswa Miskin bagi siswa yang tidak mampu. (W_{1,2}; O₂).</p> <p>Memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) bagi siswa SMA/MA/SMK. (W₂; O_{1,2}).</p> <p>Membangun Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK, serta memperbaiki ruang kelas yang rusak ringan dan rusak berat. (W₁; O₂).</p> <p>Melengkapi fasilitas belajar mengajar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. (W₃; O₂).</p> <p>Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru SMA/MA/SMK ke jenjang pendidikan S1. (W₄; O_{1,2}).</p>
<p style="text-align: center;">THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Ada beberapa daerah yang sulit untuk dikembangkan sektor pendidikannya. Dengan adanya otonomi daerah memungkinkan terjadinya per-bedaan mutu pendidikan antara masing-masing kabupaten/kota. Belum adanya legalisasi peraturan Daerah tentang Wajib Belajar pendidikan 12 tahun. Pembiayaan untuk sektor pendidikan semakin lama semakin tinggi. 	<p style="text-align: center;">STRATEGI ST</p> <p>Menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung (infrastruktur). (S₂; T₁).</p>	<p style="text-align: center;">STRATEGI WT</p> <p>Mengembangkan pola atau model pendidikan untuk pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. (W_{1,2,3,4}; T_{1,2}).</p>

Sumber : Hasil perencanaan penulis

kekuatan 2, kekuatan 3, dan kekuatan 4, serta dengan memanfaatkan peluang 1, peluang 2 dan peluang 3. 2) Menyediakan fasilitas pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung (infrastruktur) ($S_2; T_1$). Strategi ini disusun dengan menggunakan kekuatan 2 untuk mengatasi ancaman 1. 3) Memberikan bantuan dana Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi siswa yang tidak mampu. ($W_{1,2}; O_2$). Strategi ini disusun dengan memanfaatkan peluang 2 untuk meminimalkan kelemahan 1 dan kelemahan 2. 4) Memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi siswa SMA/MA/SMK dan memberikan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) bagi SMA/MA/SMK. ($W_2; O_{1,2}$). Strategi ini disusun dengan memanfaatkan peluang 1 dan peluang 2 untuk meminimalkan kelemahan 2. 5) Membangun Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/MA/SMK, serta memperbaiki ruang kelas SMA/MA/SMK yang rusak ringan dan rusak berat. ($W_3; O_2$). Strategi ini disusun dengan memanfaatkan peluang 2 untuk meminimalkan kelemahan 3. 6) Melengkapi fasilitas belajar mengajar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. ($W_3; O_2$). Strategi ini disusun dengan memanfaatkan peluang 2 untuk meminimalkan kelemahan 3. 7) Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru SMA/MA/SMK ke jenjang pendidikan S1. ($W_4; O_{1,2}$). Strategi ini disusun dengan memanfaatkan peluang 1 dan peluang 2 untuk

mengatasi kelemahan 4. 8) Mengembangkan pola atau model pendidikan untuk pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. ($W_{1,2,3,4}; T_{1,2}$). Strategi ini disusun dengan meminimalkan kelemahan 1, kelemahan 2, kelemahan 3, dan kelemahan 4 serta untuk menghindari ancaman 1 dan ancaman 2.

Untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun, maka pemerintah Sumatera Barat harus merencanakan penyelenggaraan wajib belajar pada kabupaten/kota sesuai dengan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Atas dasar itu maka dapat dirumuskan beberapa program yang dapat dilakukan, yaitu: 1) Memperluas Program Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM). 2) Memperluas program beasiswa bagi siswa SMA/MA/SMK. 3) Meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK). 4) Peningkatan kualifikasi pendidikan guru SMA/MA/SMK. 5) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. 6) Pengadaan transportasi bagi siswa SMA/MA/SMK. 7) Pengadaan sekolah berasrama jenjang pendidikan SMA/SMK.

Selanjutnya berdasarkan program-program di atas, untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun direncanakan beberapa kegiatan, sebagai berikut: 1) Memberikan Bantuan Operasional

Manajemen Mutu (BOMM) SMA. 2) Memberikan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK. 3) Pemberian Beasiswa Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi Siswa SMA/MA yang tidak mampu. 4) Pemberian Beasiswa Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi siswa SMK yang tidak mampu. 5) Membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMK. 6) Memperbaiki ruang kelas SMA/MA/SMK yang rusak ringan. 7) Memperbaiki ruang kelas SMA/MA/SMK yang rusak berat. 8) Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru SMA/MA/SMK ke Jenjang Pendidikan Strata 1 (S1). 9) Revitalisasi Peralatan SMK. 10) Pemberian bantuan BOS buku Bagi SMA/MA/SMK. 11) Membangun perpustakaan SMA/MA/SMK. 12) Menyediakan transportasi atau angkutan sekolah. 13) Mendirikan sekolah berasrama (*boarding school*) untuk daerah terpencil dan terisolasi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT untuk menentukan strategi dan kebijakan, dapat ditentukan beberapa kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun. Selanjutnya untuk menghitung besarnya anggaran yang dibutuhkan dilakukan dengan mengalikan volume dengan harga satuan ($\text{volume} \times \text{harga satuan}$), besarnya harga satuan mengacu pada Standar Anggaran Belanja (SAB) Departemen Pendidikan Nasional. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk

melaksanakan Wajib Belajar pendidikan 12 Tahun dapat dilihat pada tabel 4.11.

Dengan mengacu pada alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk sektor pendidikan, penulis menyimpulkan dari aspek anggaran, pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap dan mampu untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 115.773.945,- sehingga target universal untuk pencapaian lama sekolah penduduk selama 12 tahun dapat dicapai pada tahun 2015.

PENUTUP

Tujuan pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Sumatera Barat, potensi untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun ini sangat tinggi, hal ini sesuai dengan perencanaan pembangunan pendidikan dalam RPJP 2005-2025 dan didukung oleh kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Barat melalui pengalokasian dana untuk sektor pendidikan mencapai 20% dari APBD.

Keberhasilan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, dilihat dengan besarnya capaian indikator pemerataan dan perluasan pendidikan, yang meliputi: pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 12. Perencanaan Kegiatan dan Alokasi Anggaran untuk melaksanakan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun di Provinsi Sumatera Barat

No	Kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan	Total biaya
1	Memberikan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMA	116,591	siswa	100,000	11,659,100,000
2	Memberikan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK	90,293	siswa	125,000	11,286,625,000
3	Pemberian Beasiswa Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi Siswa SMA/MA yang tidak mampu	16,804	siswa	780,000	13,107,120,000
4	Pemberian Beasiswa Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi siswa SMK yang tidak mampu	10,745	siswa	780,000	8,381,100,000
5	Membangun Unit Sekolah Baru (USB) SMK	19	sekolah	1,000,000,000	19,000,000,000
6	Memperbaiki ruang kelas SMA/MA/SMK yang rusak ringan	486	ruang kelas	25,000,000	12,150,000,000
7	Memperbaiki ruang kelas SMA/MA/SMK yang rusak berat	319	ruang kelas	50,000,000	15,950,000,000
8	Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru SMA/MA/SMK ke Jenjang pendidikan Strata 1 (S1)	1,770	orang	2,000,000	3,540,000,000
9	Revitalisasi Peralatan SMK	18	sekolah	500,000,000	9,000,000,000
10	Pemberian bantuan BOS buku bagi SMA/MA/SMK	19	Sekolah	50,000,000	950,000,000
11	Membangun perpustakaan SMA/MA/SMK	19	Sekolah	150,000,000	2,850,000,000
12	Menyediakan transportasi atau angkutan sekolah	19	Paket	100,000,000	1,900,000,000
13	Mendirikan sekolah berasrama untuk daerah-daerah terisolir	4	Sekolah	1,500,000,000	6,000,000,000
Total Anggaran yang dibutuhkan					115.773.945.000,-

*) Harga Satuan: mengacu pada Standar Anggaran Belanja (SAB) Departemen Pendidikan Nasional

Sumber: Hasil perencanaan dan perhitungan penulis

jenjang pendidikan SMA/MA/SMK yang masih rendah, merupakan indikator masih belum tuntasnya pelaksanaan pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di provinsi Sumatera Barat. Rasio Siswa per

Guru (R-S/G) berdasarkan hasil perhitungan diperoleh terlalu banyaknya jumlah guru yang ada di Sumatera Barat pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K) berdasarkan hasil perhitungan

jumlah siswa per kelas masih di bawah dari standar ideal, sehingga masih memungkinkan penambahan jumlah siswa untuk mengikuti pendidikan SMA/MA/SMK di Sumatera Barat. Sedangkan Rasio Siswa per Sekolah (R-S/S) menunjukkan berlebihnya jumlah sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK di Sumatera Barat. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dari Dinas Pendidikan untuk melakukan verifikasi kelayakan sekolah yang ada pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

Untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun, maka diperlukan perencanaan kebutuhan guru, ruang kelas, dan sekolah yang disesuaikan dengan jumlah siswa yang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun dilaksanakan terlebih dahulu pada daerah kabupaten/kota yang telah tuntas melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Berdasarkan analisis perencanaan dibutuhkan guru sebanyak 13.778 orang, 7.234 ruang kelas, dan 804 sekolah pada tahun 2015. Berdasarkan hasil prediksi pencapaian APK SMA/MA/SMK sampai tahun 2015 sekitar 96,31 % dan capaian APM sebesar 81,74 %. Hal ini sesuai dengan target dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, dimana pendidikan 12 tahun bagi semua

penduduk dapat dicapai pada tahun 2015. Namun demikian keberhasilan pencapaian wajib belajar pendidikan 12 tahun harus didukung oleh kebijakan dan program inovatif dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, salah satunya dengan melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun.

Dengan mengacu pada alokasi anggaran yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk sektor pendidikan, penulis menyimpulkan dari aspek anggaran, pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap dan mampu untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun yang membutuhkan anggaran sebesar Rp. 115.773.945,-, sehingga target universal untuk pencapaian lama sekolah penduduk selama 12 tahun dapat dicapai pada tahun 2015.

Berkaitan dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan wajib belajar pendidikan 12 tahun, maka penulis merekomendasi hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu: 1) Pelaksanaan wajib belajar pendidikan 12 tahun dilaksanakan terlebih dahulu pada daerah kabupaten/kota yang telah tuntas melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 2) Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan

yang memadai sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (standar ideal), dan meningkatkan kualifikasi jenjang pendidikan guru-guru SMA/MA/SMK ke Strata 1. 3) Memberikan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) bagi siswa yang tidak mampu dan memberikan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) bagi siswa SMA/MA/SMK. 4) Menyediakan transportasi atau angkutan sekolah dan mendirikan sekolah berasrama untuk daerah yang sulit untuk dikembangkan sektor pendidikannya, yaitu daerah kumuh perkotaan, daerah pantai, daerah perkebunan dan daerah pinggiran hutan. 5) Membuat peraturan daerah tentang penyelenggaraan Wajib Belajar pendidikan 12 tahun. 6) Mengurangi program-program kegiatan yang kurang esensial pada anggaran fungsi pendidikan provinsi Sumatera Barat, agar dapat dikaji ulang dan memobilisasi anggaran yang ada untuk mendukung pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 12 tahun. 7) Membuat peraturan daerah yang mengatur semua urusan penduduk, harus telah mengikuti/tamat pendidikan jenjang SMA/MA/SMK, misalnya urusan pembuatan KTP, Surat Keterangan Kelakuan Baik, Surat Izin Mengemudi, Pembuatan Paspor, dll. Sehingga masyarakat Sumatera Barat akan termotivasi untuk mengikuti wajib belajar pendidikan 12 tahun.

DAFTAR RUJUKAN

- Bappeda, (2007), *RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- Bappeda, (2008), *RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- Bappenas, (2010), *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs)*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jakarta.
- Bappenas, (2008), *Paparan Rapat Koordinasi Penyusunan RPJMN 2010-2014 Perencanaan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan (Pulau-pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua)*. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- BPKP, (2005), *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah. BPKP. Jakarta.
- BPS, (2008), *Survei Sosial Ekonomi Nasional 2007 Provinsi Sumatera Barat*, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Padang.
- BPS, (2008), *Sumatera Barat dalam angka 2008*, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Padang.

- Bollag, Burton. (2003). *Study Documents Economic Benefits of Secondary and Higher Education in the Developing World*. Unesco Publishing. France.
- Depdiknas, (2005), *Pelatihan Tenaga Perencana Pendidikan*, Biro Perencanaan Sekretariat. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Depdiknas, (2007), *Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMK Boarding School Berbasis Komunitas*, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
- Depdiknas, (2008a), *Kebijakan Teknis Direktorat Pembinaan SMP*, Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Jakarta.
- Depdiknas, (2008b), *Panduan Pelaksanaan Program Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Jakarta.
- Depdiknas, (2009), *Penyusunan Rencana dan Program Pendidikan Tahun 2010*, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Dinas Pendidikan Sumbar, (2010) *Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun pelajaran 2009/2010*, Padang
- Mu'arif, (2008), *Liberalisasi Pendidikan*, Penerbit Pinus. Yogyakarta.
- Mundle, S, (1998), *Financing Human Development : some lessons from advanced asian countries*, World development 26 (4) : 659-672.
- Nazir. Moh, (2003), *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Priyono, Edi, (2007). *Pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah : Masalah dan Prospek*. (Makalah), FE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. (2008). *Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Syahza, Almasdi. (2006). *Model Pengembangan Wajib Belajar 12 Tahun (Wajar 12 Tahun) di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau*. Badan Pengkajian Pendidikan Dasar dan Menengah (BPPDM) UNRI dan Balitbangda kabupaten Bengkalis. Hasil Penelitian.
- Uno, Hamzah. B, (2007). *Membangun Pendidikan yang Berkualitas*, Forum Komunitas Pengetahuan (Kop) Pembangunan KTI, Makasar, Sulawesi Selatan. (Makalah).
- Wahyudi, L, Noeroso, (2004), *Dampak sosial ekonomi dan evaluasi belanja daerah dan proyek pembangunan, Studi kasus : Sektor Pendidikan Provinsi Jawa Timur*, Laboratorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Air langga. Surabaya.
- Woroutami, Arti Dyah, (2004), *Dampak sosial, ekonomi dan evaluasi belanja daerah dan proyek pembangunan, Studi kasus : Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara*, Universitas Sumatera Utara. Medan.

Designed by: Creative PIPM

ISSN 1693-2226



9 771693 222642